

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Berbagai perencanaan, kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pada intinya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kompleksnya masalah kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan semenjak awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya tujuan dari pembangunan adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh warga Negara dapat menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada era Kabinet Kerja ini, pemerintah masih menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang akurat dan dapat dipercaya dapat menjadikan instrumen yang diperlukan bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data

kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah:

- a. Menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan tahun 2017
- b. Menyajikan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Kota Pasuruan tahun 2017
- c. Menyajikan beberapa karakteristik rumah tangga miskin di Kota Pasuruan tahun 2017

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan pada kondisi Maret 2017. Begitu juga halnya dengan karakteristik rumah tangga miskin di Kota Pasuruan.

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penyajian

Bab I menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sumber data yang digunakan, serta sistematika penyajian.

Bab II menjelaskan tentang konsep dasar kemiskinan dan metodologi yang akan digunakan dalam penghitungan angka kemiskinan.

Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Pasuruan tahun 2017, serta karakteristik rumah tangga miskin yang ada di Kota Pasuruan tahun 2017.

Bab IV menggaris bawahi hal-hal yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya di Kota Pasuruan.

BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI



BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan secara penyebabnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap *system* atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar inilah yang disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang

pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut tidak berubah dalam hal standar hidup dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Di Amerika Serikat garis kemiskinan tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin dibandingkan dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan dibandingkan antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolute yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolute agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP US\$ perkapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan PPP US\$ ini sering disalahartikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (*exchange rate*) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga ada anggapan, jika misalkan nilai tukar adalah Rp. 10.000 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 PPP US\$ per kapita per hari menjadi RP. 300.000 per kapita per bulan, padahal bukan seperti ini pengertian yang dimaksud. Nilai tukar yang digunakan di dalam penghitungan garis kemiskinan 1 PPP US\$ adalah nilai tukar dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang “sama” di negara lain. Contoh sederhana adalah sebagai berikut, apabila di Indonesia seorang membeli beras seharga Rp. 5.000 per liter,

sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 10.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5.000.

Saat ini ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP US\$ 1,25 per kapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,38 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) PPP US\$ 2 per kapita per hari, yaitu sekitar 2,09 miliar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut.

2.2. Kriteria Kemiskinan

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli antara lain adalah:

1. Menurut *United Nation* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.
2. Menurut *United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD) (1996), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan cultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri dari: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh *Thee Kian Wie* (1981: 31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Berikut ini adalah beberapa kriteria dan garis kemiskinan yang sering dipakai sebagai rujukan dalam kajian akademis tentang kemiskinan:

Tabel 2.1

Beberapa Kriteria Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

No. Urut	Penelitian	Kriteria	Daerah		
			Kota (K)	Desa (D)	K + D
1.	Esmara, 1969/1970	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	480 360 270	320 240 180	- - -
3.	Ginneken, 1969	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 40
5.	Gupta, 1973	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp)	-	-	24000
6.	Hasan, 1975	Pendapatan minimum per kapita per tahun (US \$)	125	95	-
7.	Sayogya, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	8240	6585	-
8.	Bank Dunia, 1984	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6719	4479	-
9.	Garis Kemiskinan Internasional, Interim Report, 1976	Pendapatan per kapita per tahun: - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas Daya Beli	- -	- -	75 200
10.	World Bank	Pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP	-	-	1,25
11.	Rekomendasi dari FAO dan WHO di Roma tahun 2001	Batas minimal kalori sesuai kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja (kkal)	-	-	2100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penghitungan Kemiskinan Makro Indonesia

2.3. Metode Penghitungan Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori (kkal) perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

dimana:

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implicit rata-rata kalori menurut daerah-j dari penduduk referensi, sehingga didapatkan:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana:

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$GKM_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

dimana:

GKM_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energy setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

Garis kemiskinan non makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih

yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_j = \sum_{k=1}^n r_i \times V_i$$

Dimana:

- GKNM_j = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok non makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004)
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub kelompok non makanan di daerah j

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

$$GK = GKM + GKNM$$

2.5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

Pertama, *Head Count Index* (HCI – P₀), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P_1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P_2), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun rumus untuk mendapatkan ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

α = 0, 1, 2

z = Garis Kemiskinan (GK)

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$, diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P_1), jika $\alpha = 2$ diperoleh indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P_2).

BAB 3

KEMISKINAN

DI KOTA PASURUAN



BAB III

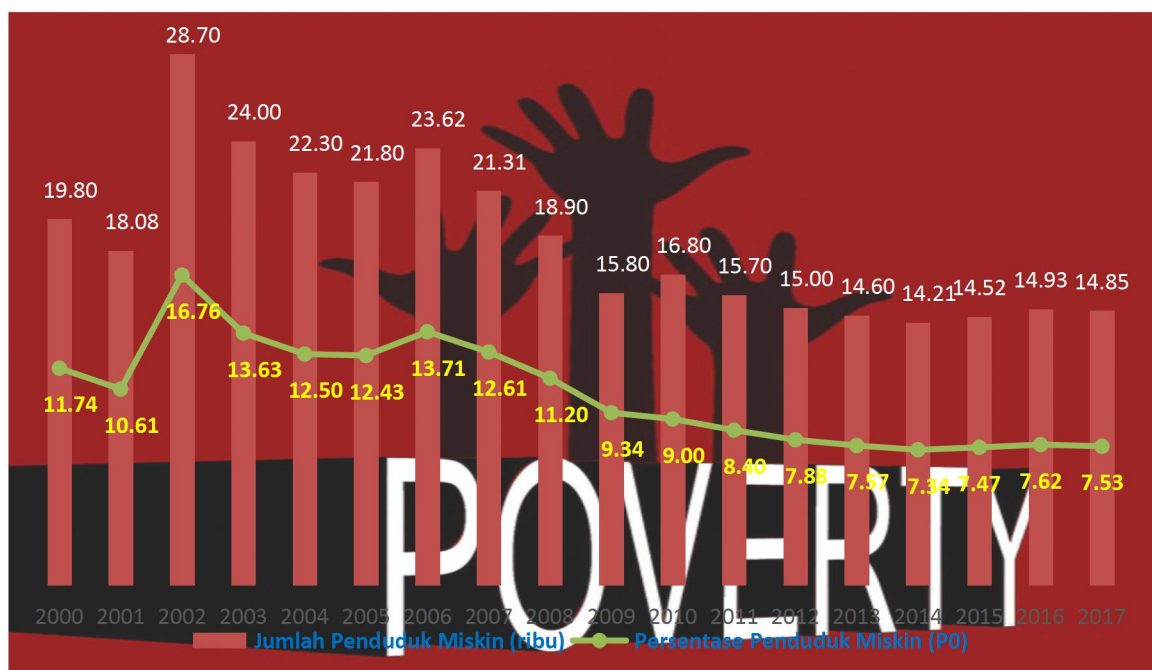
KEMISKINAN DI KOTA PASURUAN

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Pasuruan, 1998-2017

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan pada periode tahun 1998-2017 ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin.

Gambar 3.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kota Pasuruan, 2000 – 2017



Sumber: Susenas 2017, data diolah

Pada tahun 2002 terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin yang tajam yaitu menjadi 16,76 persen. Kemudian tahun berikutnya terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, pada tahun 2006 terjadi peningkatan

sedikit menjadi 13,71 persen. Dan setelah tahun 2006 hingga tahun 2017, penduduk miskin di Kota Pasuruan terlihat adanya penurunan. Kemudian pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,09 dibanding tahun sebelumnya, dan secara jumlah turun sebesar 0,08 ribu penduduk miskin.

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Pasuruan pada 2016-2017

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren kemiskinan antara kondisi tahun 2016 dan 2017. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

3.2.1. Garis Kemiskinan

Untuk menentukan jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah, diperlukan ukuran yang dijadikan sebagai batasan dari pengertian miskin, yaitu garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan itulah yang dinamakan penduduk miskin. Garis kemiskinan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 378.593,-. Sehingga garis kemiskinan pada periode 2016 - 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.396,- perkapita per bulan atau sebesar 4,52 persen, yaitu dari Rp. 362.224,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 378.593,- .

Tabel 3.1

Garis Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2017
(Rp/Kapita/Bulan)

Tahun	Garis Kemiskinan (GK)
(1)	(2)
2016	362.224
2017	378.593

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2016 dan Maret 2017

3.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 14,85 ribu orang (7,53 persen), angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,08 ribu jiwa dari keadaan tahun 2016 dengan jumlah penduduk miskin 14,93 ribu jiwa (7,62 persen).

Tabel 3.2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pasuruan
Tahun 2016 - 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	14,93	7,62	0,08	0,09
2017	14,85	7,53		

Sumber: Diolah dari data Susenas 2016 dan 2017

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2017 dimungkinkan karena naiknya pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan

pada tahun 2017. Tercatat angka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di tahun 2017 sebesar 5,47 persen, naik 0,01 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,46 persen.

3.2.3. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan suatu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan sebesar 0,58, turun 0,95 dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 1,53. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Pasuruan semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 3.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Pasuruan, 2016 - 2017

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
2016	1,35	0,32
2017	0,58	0,09

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2016 dan Maret 2017

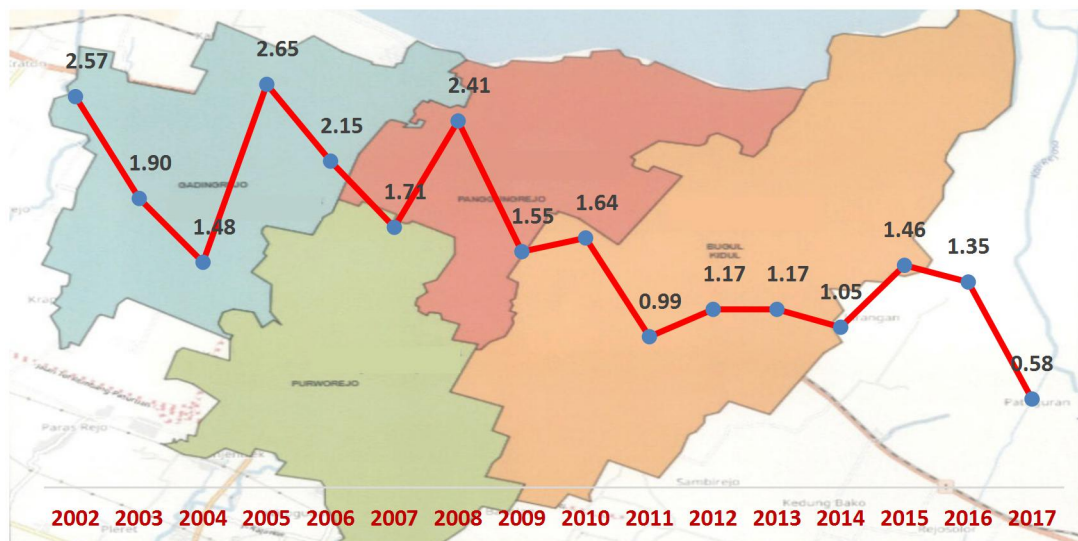
Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 0,09, turun 0,23 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin tidak terlalu jauh (tidak timpang).

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pasuruan, Tahun 2002-2017

Secara umum nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pasuruan pada periode 2002 – 2017 berfluktuasi. Dapat dilihat pada Gambar 3. 2 bahwa indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 2,57 pada tahun 2002 menjadi 0,58 pada tahun 2017.

Gambar 3.2

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kota Pasuruan
Tahun 2002 – 2017



Sumber: Susenas 2002-2017, data diolah

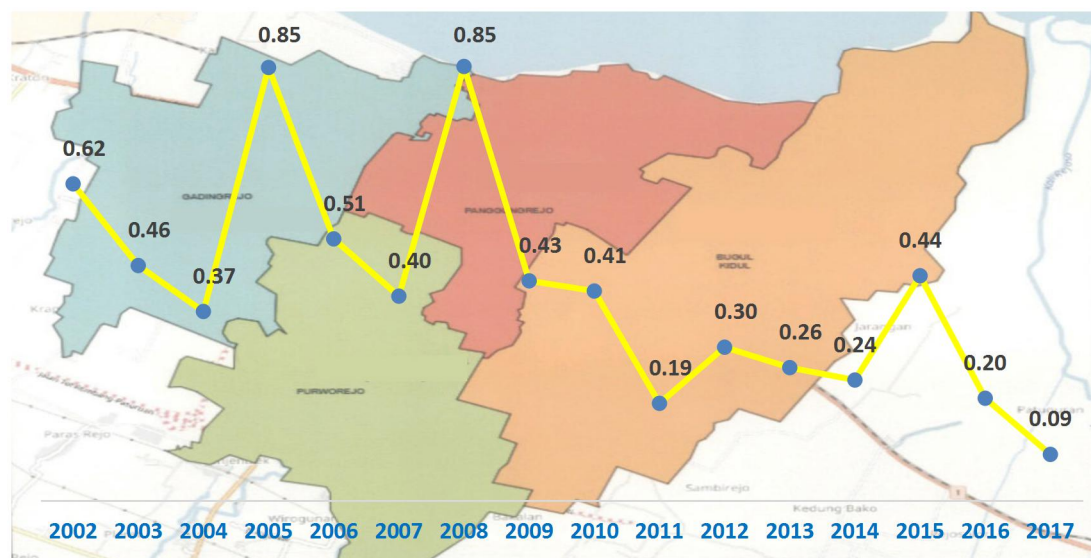
Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pasuruan mencapai angka tertinggi pada tahun 2005 (2,65) sedangkan indeks kedalaman terendah di tahun 2017 yaitu 0,58. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran penduduk miskin jaraknya mencapai titik yang terdekat dengan garis kemiskinan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pasuruan, Tahun 2002-2017

Seperti halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan di Kota Pasuruan periode tahun 2002-2017 juga berfluktuasi. Akan tetapi nilai indeks keparahan kemiskinan di Kota Pasuruan tidak pernah diatas 1 (satu).

Gambar 3.3

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan
Tahun 2002-2017



Sumber: Susenas 2002-2017, data diolah

Dari Gambar 3.3 diatas dapatlah dilihat bahwa dari tahun 2002-2017, nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Pasuruan tidak melebihi 1(satu), hal ini mengindikasikan bahwa sebaran pengeluaran diantara

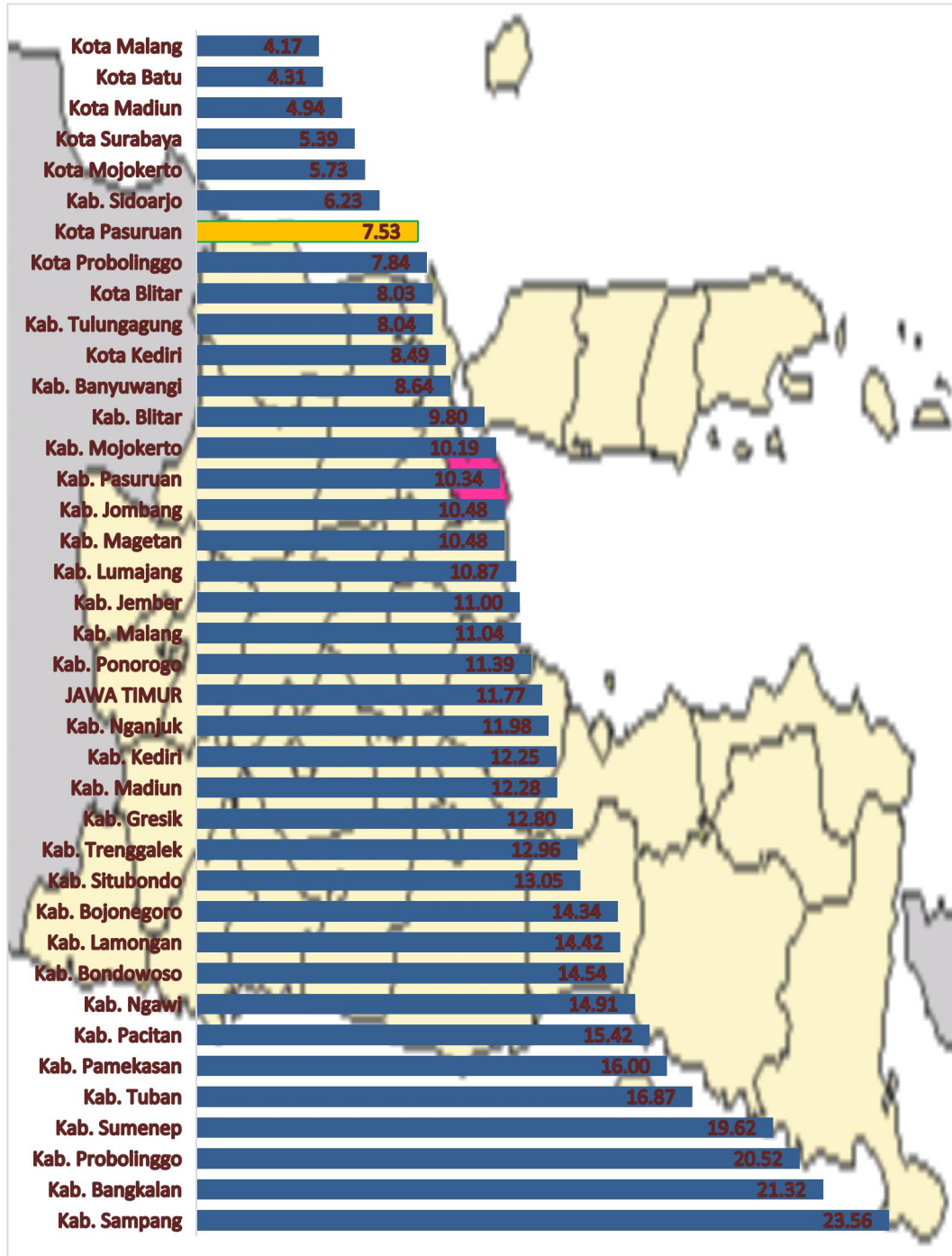
penduduk miskin tidak jauh atau dengan kata lain diantara penduduk miskin hampir tidak terjadi ketimpangan. Dan indeks keparahan kemiskinan mencapai terendah pada tahun ini yaitu 0,09 yang berarti bahwa diantara penduduk miskin di Kota Pasuruan hampir tidak ada ketimpangan.

3.5. Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Pada Gambar 3.4 ditampilkan grafik persentase penduduk miskin kabupaten/kota seprovinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai persentase penduduk miskin tahun 2017 antar kabupaten/kota se-Jawa Timur, terdapat 13 kabupaten/kota yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin relatif rendah (nilainya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen), dan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Malang dengan 4,17 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak adalah kabupaten Sampang yaitu sebesar 23,56 persen.

Kota Pasuruan, dengan persentase penduduk miskinnya sebesar 7,53 persen, berada di rangking ke-7 terendah setelah Kabupaten Sidoarjo, dan masih lebih baik dari Kota Probolinggo dan Kota Blitar dimana persentase penduduk miskinnya masing-masing 7,84 persen dan 8,03 persen. Namun tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus berpuas diri dengan rangking tersebut, akan tetapi sebisa mungkin kemiskinan di Kota Pasuruan harus bisa diperkecil lagi persentasenya.

Gambar 3.4
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
 di Jawa Timur, Tahun 2017



Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017

3.6. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan Tahun 2017

Pengukuran kemiskinan yang berkualitas dan dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Disamping tersedianya data makro kemiskinan yang akurat, ketersediaan karakteristik kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Karakteristik rumah tangga miskin juga diharapkan dapat mengungkapkan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang menjerat penduduk miskin sehingga mampu terbebas dari jerat kemiskinan. Karakteristik ini juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha penanggulangan kemiskinan agregat melalui sasaran wilayah geografis.

Karakteristik rumah tangga miskin semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin. Informasi yang tersedia dalam Susenas ini tidak dapat mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin. Namun demikian, karakteristik rumah tangga miskin ini dapat mengungkapkan beberapa catatan mengenai persoalan mendasar tentang kemiskinan.

3.6.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, dan rata-rata usia kepala rumah tangga. Karakteristik sosial demografi tersebut dilihat persentasenya masing-masing.

Tabel 3.4

Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan, Tahun 2017

Karakteristik	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga	4,55	3,87
2. Persentase kepala rumah tangga menurut jenis kelamin:		
- Laki-laki	85,86	84,91
- Perempuan	14,14	15,09
3. Rata-rata Umur kepala rumah tangga	49,44	48,29

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Banyak anak banyak rejeki. Itulah pepatah yang umum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga yang lebih banyak. Salah satu dampak dari jumlah anggota rumah tangga yang besar adalah terhambatnya peningkatan sumberdaya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Dari Tabel 3.4 terlihat secara rata-rata, jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2017 adalah 4,55.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga tidak miskin di Kota Pasuruan pada tahun yang sama adalah 3,87,. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

Dilihat menurut jenis kelamin kepala rumah tangga, dari Tabel 3.4 di atas terlihat bahwa distribusi persentase wanita sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2017 di Kota Pasuruan hanya 14,14 persen, sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih dominan yaitu mencapai 85,86 persen. Sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,09 persen, sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebanyak 84,91 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata rumah tangga di Kota Pasuruan sebagian besar laki-laki adalah kepala rumah tangga.

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat distribusi umur dan produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, meskipun hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linier. Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 49,44 tahun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yaitu 48,29. Secara umum rata-rata umur kepala rumah tangga di Kota Pasuruan pada tahun 2017 masih dikategorikan sebagai usia produktif.

3.6.2. Karakteristik Pendidikan

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang akan diuraikan disini adalah distribusi persentase penduduk miskin dalam kemampuan membaca dan menulis, serta tingkat pendidikan tertinggi penduduk miskin (dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki kepala rumah tangga).

Tabel 3.5

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga, Tahun 2017

Kemampuan Baca Tulis	RumahTangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	57,42	32,87	10,79
Huruf Lainnya	0	0,49	0
Huruf Latin dan Lainnya	33,70	63,76	3,53
Tidak Bisa Baca Tulis	8,88	2,88	17,60
Ijasah Tertinggi Kepala Rumah Tangga:			
- Tidak punya ijasah	20,11	20,79	6,28
- SD/ sederajat	47,29	22,44	12,74
- SMP/ sederajat	15,12	14,51	6,73
- SMA/ sederajat	17,48	30,95	3,76
- Lebih dari SMA	0	11,30	0

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dari Tabel 3.5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan di Kota Pasuruan tidak dipengaruhi oleh kemampuan baca dan tulis dari kepala rumah tangganya. Hal ini tampak dari persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) hanya 8,88 persen, sedangkan yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf hijaiyah dan huruf lainnya) mempunyai persentase yang lebih besar. Begitu juga halnya dengan rumah tangga tidak miskin.

Akan tetapi, apabila dibandingkan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin, tampak bahwa persentase kepala rumah tangga yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) lebih besar pada rumah tangga yang miskin (8,88 persen) dibandingkan rumah tangga tidak miskin (2,88 persen). Sejalan dengan itu, nilai *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) sebesar 17,60 persen, tertinggi dibanding *Head Count Index* untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Tingkat pendidikan tertinggi seseorang dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki orang itu. Dari Tabel 3.5 diatas dapat juga dilihat bahwa sebagian besar, kepala rumah tangga miskin memiliki ijazah kurang dari Sekolah Dasar (SD)/sederajat, yakni 67,40 persen (47,29 persen memiliki ijazah SD/sederajat dan 20,11 persen tidak memiliki ijazah). Hanya 32,6 persen dari rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya berijazah SMP keatas. Untuk rumah tangga tidak miskin, persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang memiliki ijazah tertinggi kurang dari SD/sederajat juga tinggi (22,44 persen memiliki ijazah SD/sederajat dan 20,79 persen tidak memiliki ijazah), dan kepala rumah tangga tidak miskin yang memiliki ijazah diatas SMP adalah 56,76 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

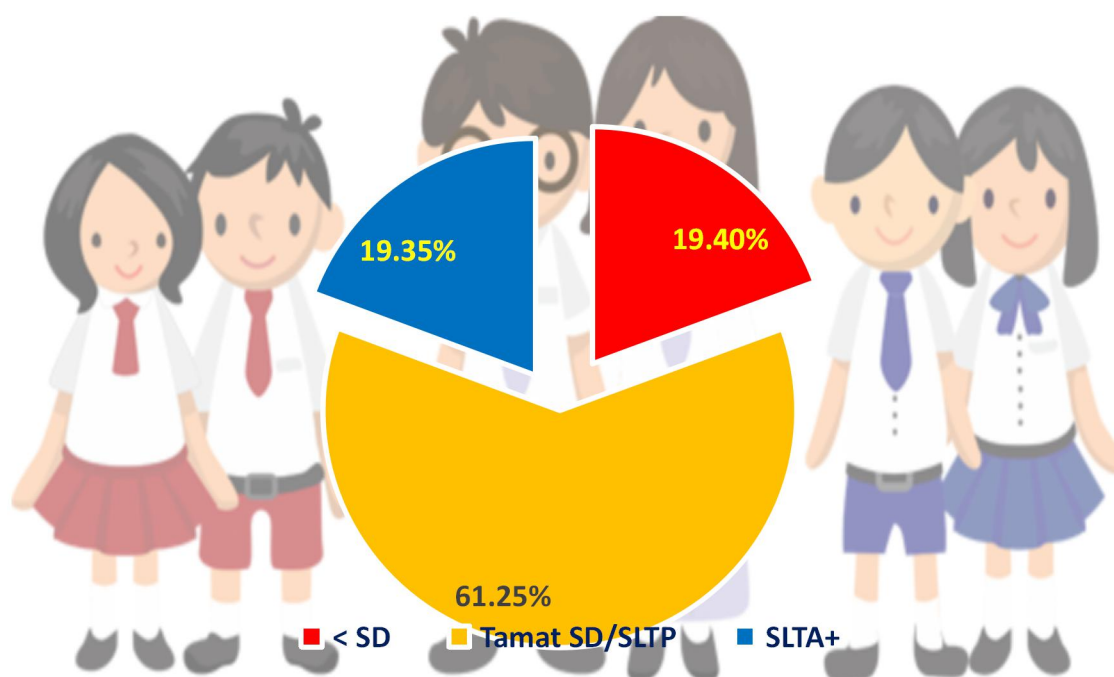
Dari Tabel 3.5 juga terlihat bahwa nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah lebih tinggi dibanding yang berpendidikan SLTP ke atas. Hal ini berarti rumah tangga miskin banyak dijumpai pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah.

Jika sebelumnya yang dibahas tentang kepala rumah tangga, bagaimana dengan penduduk secara keseluruhan. Dari Gambar 3.5 di bawah dapat dilihat sebagian besar penduduk miskin yang berusia 15 tahun keatas berpendidikan tamat SD dan SLTP yaitu sebesar 61,25

persen. Bahkan terdapat sebanyak 19,40 persen adalah penduduk miskin yang berpendidikan kurang dari SD, sedangkan yang berpendidikan diatas SLTA sebesar 19,35 persen. Hal ini makin membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan penduduk. Pendidikan yang masih rendah mempersulit seseorang untuk keluar dari jurang kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan juga membuat rumah tangga tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena terkendala biaya.

Gambar 3.5

Persentase Penduduk Miskin yang Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2017



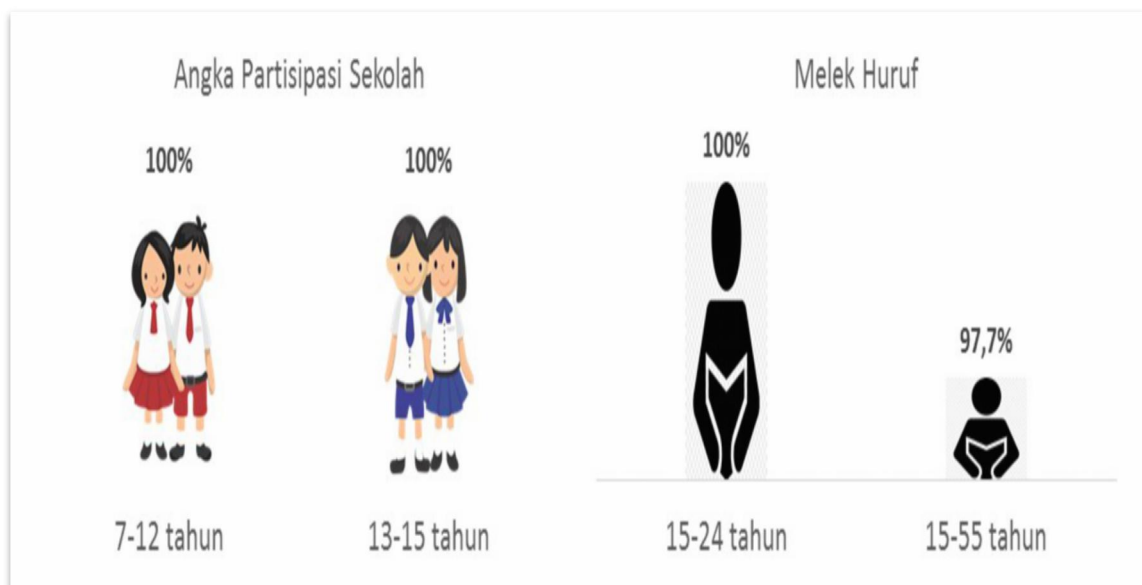
Sumber: Susenas 2017, data diolah

Selain data penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan partisipasi sekolah juga tidak kalah menarik. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat, bahwa angka melek huruf untuk penduduk miskin berusia 15 – 24 tahun sebesar 100 persen, artinya bahwa seluruh penduduk miskin yang berusia 15-24 tahun semuanya sudah bisa

membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Akan tetapi untuk usia 15-55 tahun, dapat dilihat bahwa angka melek huruf di rentang usia tersebut adalah 97,70 persen. Hal ini berarti bahwa diantara penduduk miskin usia 25-55 tahun ada buta huruf.

Gambar 3.6

Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Di Kota Pasuruan Tahun 2017



Sumber: Susenas 2017, data diolah

Untuk angka partisipasi sekolah penduduk miskin, dari Gambar 3.6 diatas, dapat dilihat untuk penduduk miskin usia 7-12 tahun (usia SD) dan penduduk miskin usia 13-15 tahun (usia SLTP), angkanya 100 persen semua. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun miskin akan tetapi pendidikan tetap diutamakan, terutama sampai pendidikan setara SLTP.

3.6.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik

ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Tabel 3.6

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga, Tahun 2017

Lapangan Usaha	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Bekerja	22,11	14,36	9,63
Pertanian	18,92	8,82	12,93
Industri Pengolahan	8,66	19,70	2,95
Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan	11,26	20,71	3,63
Lainnya	39,05	36,41	6,91

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Distribusi rumah tangga miskin menurut lapangan usaha kepala rumah tangga disajikan pada Tabel 3.6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja sebesar 22,11 persen, dan sebanyak 18,92 persen kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Sedangkan kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor industri sebesar 8,66 persen, bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan sebesar 11,26 persen, dan sisanya 39,05 persen bekerja di sektor lainnya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa mereka miskin karena kepala rumah tangganya tidak bekerja. Persentase terbesar kedua adalah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, hal ini juga menguatkan dugaan bahwa profil

orang miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini juga diperkuat dengan nilai *Head Count Index* untuk kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 12,93 persen, terbesar diantara nilai *Head Count Index* pada sektor yang lain.

Pola distribusi rumah tangga tidak miskin menurut lapangan usaha kepala rumah tangga berbeda dengan pola pada rumah tangga miskin. Pada rumah tangga tidak miskin, kepala rumah tangga terbanyak bekerja di sektor industri yaitu 20,71 persen dan sektor lainnya (sektor lainnya antara lain sektor jasa, transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi) sebesar 36,41 persen.

Tabel 3.7

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga, Tahun 2017

Status Pekerjaan	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	<i>Head Count Index</i> (HCI)
(1)	(2)	(3)	
Tidak Bekerja	22,11	14,36	9,63
1	35,27	24,45	9,08
2	4,29	4,53	6,15
3	-	6,63	-
4	19,41	45,26	2,88
5	18,92	3,94	24,97
6	-	0,85	-

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Keterangan :

- 1 = Berusaha sendiri
- 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- 4 = Buruh/karyawan/pegawai
- 5 = Pekerja bebas
- 6 = Pekerja keluarga atau tidak dibayar

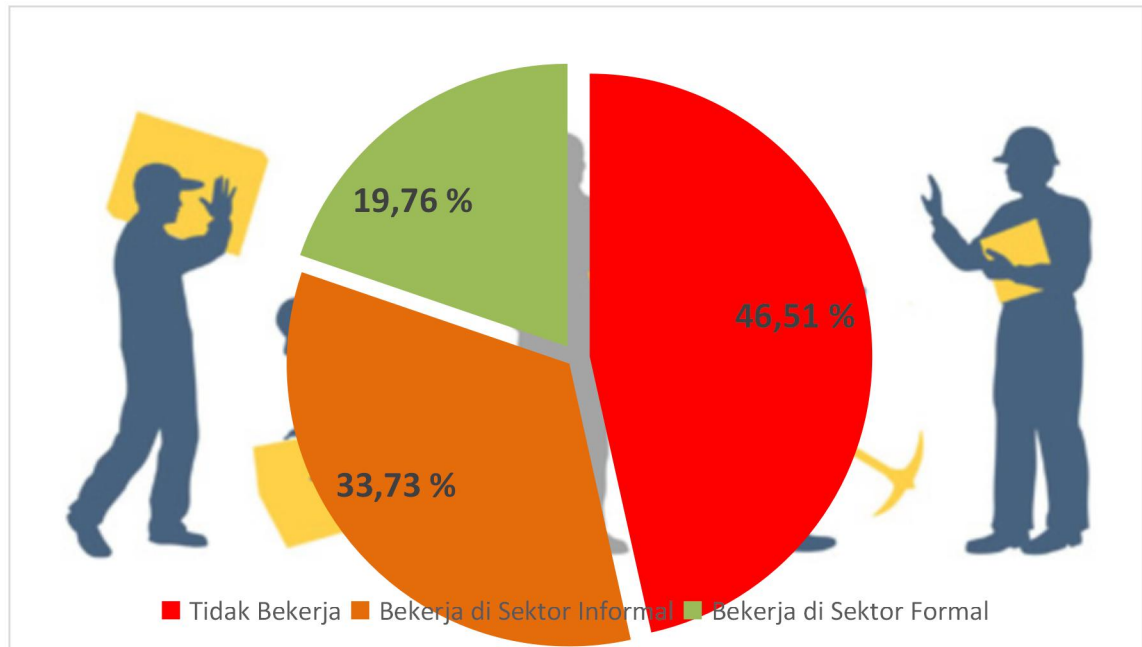
Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Ditinjau dari status pekerjaan utama, terlihat bahwa sebanyak 67,52 persen berstatus berusaha sendiri, sedangkan yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 19,41 persen, dan berstatus sebagai pekerja bebas sebesar 18,92 persen.

Akan tetapi, dari nilai Head Count Index-nya, justru rumah tangga miskin lebih tinggi proporsinya pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja sebagai pekerja bebas (baik pekerja bebas di pertanian maupun bukan pertanian), yaitu tercatat 24,97 persen, dimana nilai ini adalah tertinggi dibanding rumah tangga yang kepala rumah tangganya berstatus berusaha sendiri atau berstatus sebagai buruh/pegawai/karyawan. Dengan demikian, rumah tangga miskin menurut status pekerjaan kepala rumah tangga paling banyak ditemui berturut-turut jika kepala rumah tangga berstatus pekerja bebas, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan berstatus buruh/pegawai/karyawan.

Berbeda dengan pola distribusi rumah tangga tidak miskin, status pekerjaan kepala rumah tangga yang terbanyak persentasenya adalah buruh/karyawan/pegawai (45,26 persen), lalu diikuti oleh status pekerjaan berusaha sendiri (24,45 persen).

Untuk melihat secara umum gambaran penduduk miskin di Kota Pasuruan dalam hal ketenagakerjaan, dapat dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini. Dari gambar tersebut, persentase penduduk miskin berusia 15 tahun keatas yang tidak bekerja sebesar 46,51 persen, sedang yang bekerja di sektor informal sebesar 33,73 persen, dan yang bekerja di sektor formal sebesar 19,76 persen. Hal ini semakin memperjelas bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pekerjaan. Rumah tangga tidak mendapat penghasilan yang cukup apabila anggota rumah tangganya tidak bekerja.

Gambar 3.7
 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Pasuruan
 Menurut Status Bekerja Tahun 2017



Sumber: Susenas 2017, data diolah

Kemudian jika dilihat lagi dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja, nampak pada Gambar 3.7 bahwa sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal (33,73 persen), jauh lebih besar dibanding penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal (19,76 persen).

3.6.4. Karakteristik Perumahan

a. Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah keleluasaan pribadi dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m^2). Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah perkapitanya minimal $8 m^2$. Pada Tabel 3.8 dibawah ini disajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai perkapita.

Tabel 3.8

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan
Menurut Luas Lantai per Kapita (m²), Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 8 m ²	38,43	12,79	17,23
8m ² < Luas ≤ 15 m ²	27,78	25,77	6,95
>15 m ²	33,78	61,44	3,67

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Ditinjau dari distribusi rumah tangga miskin menurut luas lantai rumah perkapita di atas, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita kurang dari 8 meter persegi sebesar 38,43 persen, tertinggi dibandingkan kategori yang lainnya. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin, persentase terbesar adalah rumah tangga yang menempati luas lantai per kapita lebih dari 15 meter persegi. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin sebagian besar menempati rumah tidak sehat.

Sejalan dengan itu, nilai Head Count Index untuk rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 8 meter persegi tercatat sebesar 17,23 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang mempunyai luas lantai per kapita lebih dari 8 meter persegi. Hal ini semakin menguatkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah yang tidak sehat banyak ditemui pada rumah tangga miskin.

b. Jenis Lantai

Indikator perumahan lainnya yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah jenis lantai rumah. Indikator ini bisa dilihat dari bahan bangunan utama lantai rumah terluas. Dari Tabel 3.9 tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang jenis lantainya bukan tanah sebesar 95,74 persen, hanya

5,94 persen rumah tangga miskin yang jenis lantainya dari tanah. Begitu halnya dengan rumah tangga tidak miskin, sebagian besar rumah tangga tidak miskin memiliki jenis lantai bukan tanah (99,76 persen). Artinya bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Pasuruan sudah memiliki rumah dengan lantai terluas bukan tanah.

Apabila dirinci lagi dari jenis lantai yang bukan tanah, persentase rumah tangga miskin yang jenis lantainya dari semen/bata merah/bambu sebesar 22,57 persen, sedangkan untuk rumah tangga yang tidak miskin sebesar 8,71 persen rumah tangga yang jenis lantainya dari semen/bata merah/bambu.

Sementara itu, nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga dengan jenis lantai terluas tanah adalah 63,39 persen, tertinggi diantara jenis lantai yang lain. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penggunaan jenis lantai tanah merupakan bagian dari sosio-kultural masyarakat.

Tabel 3.9

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Jenis Lantai Terluas, Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	<i>Head Count Index</i> (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmer/keramik/Parket/Vinil/Ubin/Tegel/ Kayu Berkualitas Tinggi	71,49	91,05	5,16
Semen/Bata Merah/Bambu	22,57	8,71	15,03
Tanah	5,94	0,24	63,39

Sumber: Susenas 2017, data diolah

c. Jenis Dinding

Jika dilihat berdasarkan jenis dinding rumah, dari Tabel 3.10 dibawah ini tampak bahwa sebagian besar rumah tangga miskin rumahnya sudah berdinding tembok yaitu sebesar 83,04 persen, sedangkan yang jenis dinding rumahnya bukan tembok hanya sebesar 16,95 persen. Untuk rumah tangga tidak miskin, hampir seluruhnya (98,70 persen) dinding rumahnya tembok, hanya 1,17 persen yang memiliki dinding bukan tembok. Hal ini memperlihatkan bahwa di Kota Pasuruan, hampir seluruh rumah sudah memiliki dinding tembok, baik rumah tangga miskin ataupun rumah tangga tidak miskin.

Tabel 3.10

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2017

Kategori Jenis Dinding Terluas	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	83,04	98,70	5,51
Plesteran anyaman bamboo/kawat	-	0,17	-
Kayu/papan	9,18	0,78	44,84
Anyaman bambu	7,77	0,22	60,33

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Jika dibandingkan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin pada jenis dinding terluas anyaman bambu, tampak bahwa persentase terbanyak rumah tangga dengan dinding terluas anyaman bambu adalah rumah tangga miskin. Hal ini juga diperkuat dengan nilai *Head Count Index* untuk dinding anyaman bambu, nilainya tertinggi diantara nilai *Head Count Index* jenis dinding yang lain (60,33 persen).

d. Jenis Penerangan

Berdasarkan jenis penerangan yang digunakan, penggunaan listrik PLN dengan meteran di rumah tangga tidak miskin yaitu 92,31 persen, lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga miskin yang sebesar 84,82 persen. Sedangkan penggunaan listrik PLN tanpa meteran di rumah tangga miskin yaitu 15,18 persen, lebih tinggi dibanding di rumah tangga tidak miskin yaitu 7,18 persen (Tabel 3.10). Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran (12,77 persen) lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan meteran dan rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN, hal ini berarti bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran untuk penerangan di rumah.

Tabel 3.11

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan
Menurut Sumber Penerangan Rumah Tahun 2017

Sumber Penerangan Rumah	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN dengan meteran	84,82	92,31	5,98
Listrik PLN tanpa meteran	15,18	7,18	12,77
Listrik Non PLN	-	0,52	-

Sumber: Susenas 2017, data diolah

e. Sumber Air

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikutnya

didefinisikan air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter. Ketidaktersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Tabel 3.12

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Sumber Air Minum Utama Rumah Tangga Tahun 2017

Sumber Air Minum	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Bersih *)	92,5	87,9	6,8
Lainnya	7,5	12,1	4,1

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Keterangan:

*) Air bersih meliputi air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa sebagian rumah tangga di Kota Pasuruan sudah menikmati air bersih sebagai sumber air minumannya. Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menikmati air bersih sebagai sumber air minum sebesar 92,5 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 87,9 persen. Begitu juga dengan nilai *Head Count Index*, untuk rumah tangga miskin yang menikmati air bersih nilainya lebih tinggi daripada rumah tangga yang menikmati air lainnya. Keadaan ini dikarenakan banyaknya rumah tangga tidak miskin yang tinggal di perumahan, dimana sumur bor rumah dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja jaraknya tidak memenuhi syarat air bersih.

f. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ketersediaan tempat buang air besar menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Disamping ada tidaknya fasilitas buang air besar/jamban, indikator penggunaan fasilitas buang air besar/jamban juga penting, yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, jamban umum, dan tidak ada fasilitas buang air besar/jamban.

Tabel 3.13

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Penggunaan Jamban Rumah Tangga, Tahun 2017

Jenis Jamban Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	
Jamban Sendiri	53,20	75,60	4,65
Jamban Bersama/ Komunal	14,72	8,75	10,44
Jamban Umum	12,47	8,34	9,31
Tidak Ada Jamban	19,71	7,31	15,73

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar/jamban, tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 53,20 persen, lebih rendah dibanding rumah tangga tidak miskin yang sebesar 75,60 persen. Sementara itu, rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama/komunal, jamban umum maupun tidak ada jamban, persentasenya lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin.

Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang tidak mempunyai jamban yaitu 15,73 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang

mempunyai jamban. Bahkan Head Count Index untuk rumah tangga yang memiliki jamban sendiri nilainya paling kecil (4,65 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar.

g. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Ketika masyarakat penganut paham persamaan (*egalitarian society*) memberikan perhatian tentang status kepemilikan rumah, disana akan mempertimbangkan antara insentif pribadi dan hak kekayaan sosial yang keduanya seringkali saling berlawanan. Meskipun begitu kedua pilihan tersebut harus diharmonisasikan. Suatu bangsa yang mengenyampingkan penekanan terhadap hak kekayaan sosial harus mengambil pertimbangan insentif pribadi untuk memotivasi masyarakat untuk bekerja keras. Status kepemilikan rumah tempat tinggal akan dibedakan atas tiga kelompok, yaitu rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (bebas sewa, dinas, dan lainnya).

Tabel 3.14

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, Tahun 2017

Status Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	
Milik Sendiri	83,20	77,81	6,89
Kontrak/Sewa	2,08	9,70	1,46
Bebas Sewa	14,72	10,97	8,51
Dinas	-	1,32	-
Lainnya	-	0,2	-

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah tempat tinggal tampak bahwa sebagian besar rumah tangga miskin sudah menempati rumah sendiri yaitu 83,20 persen dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 2,08 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status bebas sewa sebesar 14,72 persen. Begitu juga untuk distribusi rumah tangga tidak miskin menurut status kepemilikan rumah tempat tinggal, persentase terbesar adalah menempati rumah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Pasuruan sudah menempati rumah sendiri sebagai tempat tinggalnya.

Nilai *Head Count Index* terbesar adalah pada rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa yaitu 8,51 persen. Sementara nilai *Head Count Index* pada rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri sebesar 6,89 persen, dan 1,46 persen untuk nilai *Head Count Index* pada rumah tangga yang tinggal di rumah kontrak/sewa.

h. Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Jenis bahan bakar untuk memasak merupakan salah satu indikator perumahan yang dapat menerangkan tentang kemiskinan, hal ini berkaitan dengan kemampuan rumah tangga dalam membeli bahan bakar untuk memasak. Sebelum adanya konversi minyak tanah ke elpiji, sebagian besar rumah tangga menggunakan minyak tanah untuk memasak.

Dilihat dari Tabel 3.15 di bawah, tampak bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Kota Pasuruan menggunakan elpiji 3 kilogram untuk memasak (94,40 persen). Sedangkan sisanya tidak memasak yaitu sebesar 5,60 persen.

Tabel 3.15

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak Rumah Tangga, Tahun 2017

Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Memasak	5,60	1,49	20,70
Listrik	-	0,22	-
Elpiji 5,5 kg/bluegaz	-	1,30	-
Elpiji 12 kg	-	4,75	-
Elpiji 3 kg	94,40	91,18	6,69
Minyak tanah	-	0,67	-
Kayu bakar	-	0,40	-

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dilihat distribusi rumah tangga tidak miskin menurut jenis bahan bakar utama untuk memasak, tampak bahwa sebagian besar rumah tangga tidak miskin juga menggunakan elpiji 3 kilogram untuk memasak (91,18 persen). Sedangkan yang menggunakan elpiji 12 kilogram sebesar 4,75 persen, rumah tangga tidak miskin yang menggunakan elpiji 5,5 kilogram/bluegaz sebesar 1,30 persen, menggunakan kayu bakar sebesar 0,40 persen, dan yang menggunakan listrik untuk memasak sebesar 0,22 persen. Rumah tangga tidak miskin yang menggunakan minyak tanah juga masih ada yaitu 0,67 persen, bahkan ada rumah tangga tidak miskin yang tidak memasak (keseharian membeli di luar) yaitu sebesar 1,49 persen.

Jika dilihat perbedaan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dalam hal penggunaan bahan bakar utama untuk memasak, tampak dari Tabel 3.15 bahwa rumah tangga miskin tidak ada yang memasak menggunakan elpiji 12 kilogram, dengan listrik maupun elpiji 5,5 kilogram/bluegaz, karena memang harganya yang tidak terjangkau oleh rumah tangga miskin. Sedangkan dilihat nilai *Head Count Index*, rumah tangga yang tidak memasak memiliki nilai *Head Count Index* yang tertinggi dibandingkan rumah tangga yang menggunakan elpiji 3 kilogram.

3.6.5. Karakteristik Perlindungan Sosial

Program Beras Miskin (Raskin) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertical (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horisontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Program raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh lagi, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapatkan cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran.

Tabel 3.16

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan
Menurut Penerimaan/Pembelian Raskin, Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Menerima/ Membeli Raskin	46,19	24,49	11,55
Tidak Menerima/ Membeli Raskin	53,81	75,51	4,70

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menerima/membeli raskin (46,19 persen) lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin (24,49 persen). Begitu juga untuk persentase rumah tangga tidak miskin yang tidak menerima/membeli raskin lebih tinggi daripada rumah tangga miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa program raskin oleh pemerintah pusat sudah banyak mengenai sasaran. Hanya saja perlu evaluasi lagi untuk rumah tangga miskin yang tidak menerima/membeli raskin dan rumah tangga tidak miskin yang masih menerima/membeli raskin. Hal senada juga dilihat dari nilai *Head Count Index*, untuk rumah tangga yang menerima/membeli raskin nilai *Head Count Index* nya lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima/membeli raskin.

Program Indonesia Pintah (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintah pusat berupa bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan miskin. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan sebelumnya dari pemerintah pusat yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tabel 3.17

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan
Menurut Penerimaan PIP, Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	(4)
Menerima PIP	14,57	7,55	11,79
Tidak Menerima PIP	85,43	92,45	6,01

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dari Tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menerima PIP (14,57 persen) lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang menerima PIP (7,55 persen). Dan sebaliknya, persentase rumah tangga miskin yang tidak menerima PIP (85,43 persen) lebih rendah dibanding rumah tangga tidak miskin yang tidak menerima PIP (92,45 persen). Akan tetapi apabila dilihat secara seksama, persentase rumah tangga miskin yang menerima PIP jauh lebih kecil dibandingkan yang rumah tangga miskin yang tidak menerima PIP. Hal ini mengindikasikan bahwa program PIP yang sudah berjalan hingga saat ini masih kurang tepat sasaran.

Kartu Keluarga Sejahter (KKS) merupakan lanjutan dari program pemerintahan sebelumnya, yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Seperti halnya PIP, KKS ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin. KKS merupakan penanda keluarga kurang mampu, yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera.

Tabel 3.18

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	
Menerima KKS	10,44	12,03	5,67
Tidak Menerima KKS	89,56	87,97	6,58

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Dari Tabel 3.18, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menerima KKS sebesar 10,44 persen, lebih kecil dibanding rumah tangga tidak miskin yang menerima KKS. Begitu sebaliknya untuk rumah tangga yang tidak menerima KKS, persentase rumah tangga miskin yang tidak menerima KKS lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini berarti penerimaan KKS kurang tepat sasaran. Sejalan dengah itu, nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang tidak menerima KKS juga tinggi dibanding nilai *Head Count Index* rumah tangga yang menerima KKS.

Tabel 3.19

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Kota Pasuruan Menurut Penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tahun 2017

Kategori	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin	Head Count Index (HCI)
(1)	(2)	(3)	
Menerima KUR	-	5,39	-
Tidak Menerima KUR	100	94,61	6,82

Sumber: Susenas 2017, data diolah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain. KUR merupakan program berbasis

pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dengan targetnya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dari Tabel 3.19 di atas dapatlah dilihat bahwa program KUR di Kota Pasuruan masih jauh dari harapan. Tidak ada rumah tangga miskin yang menerima KUR. Sebaliknya, ada sebanyak 5,39 persen rumah tangga tidak miskin yang menerima KUR.

BAB 4

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,62 persen pada tahun 2016 menjadi 7,53 di tahun 2017 ini, sehingga ada penurunan sebesar 0,09 persen.

Pada periode 2016-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Pasuruan juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,35 pada tahun 2016 menjadi 0,58 pada tahun 2017. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,20 pada tahun 2016 menjadi 0,09 pada tahun 2017.

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, mengungkapkan beberapa karakteristik rumah tangga miskin Kota Pasuruan pada tahun 2017, antara lain:

- a. Jumlah anggota rumah tangga (*household size*): rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin (4,55 orang) lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (3,87 orang).
- b. Kepala rumah tangga wanita: hanya 14,14 persen rumah tangga miskin dikepalai oleh wanita dan 15,09 persen rumah tangga miskin tidak dikepalai oleh wanita.
- c. Rata-rata umur kepala rumah tangga: kepala rumah tangga miskin rata-rata berumur 49,44 tahun, sedang kepala rumah tangga tidak miskin rata-rata umurnya 48,29 tahun.
- d. Kemampuan baca tulis: hanya 8,88 persen kepala rumah tangga miskin tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) dan 2,88 persen untuk kepala rumah tangga tidak miskin.

- e. Tingkat pendidikan: hanya 17,48 persen kepala rumah tangga miskin yang memiliki ijazah SMA/ sederajat keatas, sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin sebanyak 30,95 persen yang memiliki ijazah SMA/ sederajat keatas.
- f. Lapangan usaha kepala rumah tangga: 18,92 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian, sedangkan di sektor industri hanya 8,66 persen.
- g. Status pekerjaan: 35,27 persen kepala rumah tangga miskin berstatus berusaha sendiri, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 22,11 persen.
- h. Luas lantai : 38,43 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan luas lantai perkapita maksimal 8 m².
- i. Jenis lantai rumah: sebagian kecil (5,94 persen) rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan jenis lantai tanah.
- j. Jenis dinding rumah: sebagian besar (83,04 persen) rumah tangga miskin sudah menempati rumah dengan jenis dinding tembok.
- k. Jenis penerangan: sebagian besar rumah tangga miskin sudah menggunakan listrik PLN dengan meteran untuk penerangan (84,82 persen), dan hanya 15,18 persen rumah tangga miskin yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran (nyalur) untuk penerangannya.
- l. Sumber air minum: 92,53 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan air bersih sebagai sumber utama air untuk minum.
- m. Fasilitas buang air besar: 53,20 persen rumah tangga miskin sudah memiliki jamban sendiri, akan tetapi masih ada 19,71 persen yang masih belum memiliki fasilitas buang air besar.
- n. Status kepemilikan rumah: 83,20 persen rumah tangga miskin sudah menempati rumah milik sendiri.
- o. Bahan bakar memasak: 94,40 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan elpiji 3 kg (elpiji melon) untuk memasak.

- p. Raskin: 53,81 persen rumah tangga miskin yang tidak menerima/membeli raskin.
- q. PIP: sebanyak 85,43 persen rumah tangga miskin yang tidak menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
- r. KKS: sebanyak 89,56 persen rumah tangga miskin yang tidak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- s. KUR: 100 persen rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Informasi mengenai karakteristik kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui karakteristik kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Dengan demikian berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efektif dan efisien.

4.2. Saran-saran

Dari kesimpulan tentang karakteristik kemiskinan di atas dapatlah kami memberikan saran-saran demi pemecahan masalah kemiskinan di Kota Pasuruan, antara lain:

1. Angka Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan sudah kecil (mendekati nol), artinya rumah tangga miskin yang ada di Kota Pasuruan sudah hampir dekat dengan Garis Kemiskinan. Hendaknya Pemerintah Kota bisa mempertahankan program-program pengentasan kemiskinan, sehingga angka kemiskinan bisa lebih sedikit lagi.

2. Demografi

Dengan masih besarnya rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin, pemerintah daerah harus lebih menggalakkan program Keluarga Berencana khususnya untuk rumah tangga miskin. Misalnya dengan menggratiskan biaya KB bagi rumah tangga miskin.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan diharapkan tingkat kemiskinan akan berkurang. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah tetap memberikan beasiswa khususnya bagi rumah tangga miskin.

4. Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama merupakan indikator utama tingkat kesejahteraan rumah tangga. Melihat besarnya persentase rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dibandingkan dengan persentase yang berusaha, pemerintah daerah perlu merangsang supaya bisa beralih ke usaha.

5. Perumahan

Dari data menunjukkan bahwa rumah tangga miskin masih ada yang memakai sumber air tidak bersih untuk minum. Untuk itu hendaknya pemerintah daerah, melalui PDAM lebih melebarkan jangkauannya sehingga semua masyarakat bisa menikmati, tentunya dengan memberikan harga khusus bagi rumah tangga miskin. Begitu juga untuk jamban, masih ada rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban sendiri, hendaknya pemerintah daerah memberi bantuan berupa pembangunan jamban, baik komunal maupun jamban umum.

6. Perlindungan Sosial

Melihat masih besarnya persentase rumah tangga miskin yang belum membeli/menerima beras miskin (raskin), hendaknya perlu dikaji ulang rumah tangga penerima sasaran, serta kebijakan membagi rata (*bagito = bagi roto*) dihilangkan. Begitu juga untuk program pengentasan kemiskinan yang lain. Dalam hal ini perlu ketegasan dari pemerintah daerah. Dan juga pemerintah daerah perlu untuk melihat rumah tangga miskin yang masih belum mendapatkan program pengentasan kemiskinan dari pusat, hendaknya pemerintah

daerah mengalokasikan khusus dari APBD untuk pengentasan kemiskinan, dengan program yang lebih mengenai sasaran.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna data dan informasi yang berkaitan dengan karakteristik kemiskinan. Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efektif dan efisien.